

**ANALISIS MODEL STANDAR TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL DALAM ASPEK SARANA PRASARANA DI JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SEMARANG**

Oleh :

Teti Rosiana Hidayat, Drs. Fathurrohman, M.Si

Jurusan Administasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan sampai saat ini sangat penting untuk masyarakat khususnya di Kota Semarang. Terutama pada Sarana Prasarana yang membuat sekolah-sekolah saling bersaing dilihat dari Sarana Prasarana dari tiap sekolah terutama Prestasi yang didapatkan sekolah tersebut. Dalam pendidikan Standar Nasional yang bermutu (berkualitas) adalah pendidikan yang mampu mencapai standar mutu nasional dan internasional dan pendidikan internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses dan input sekolah baik secara nasional maupun internasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003 pasal 45 diatas dijelaskan dengan peraturan daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang suatu sistem yaitu Sarana Prasarana pasal 52

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Sarana Prasarana di Kota Semarang sudah maksimal. Tetapi masih terdapat beberapa Sarana Prasarana yang masih kekurangan dari berbagai Sekolah khususnya di jejang sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Semarang.

Kata Kunci : Analisis Model Standar, Kota Semarang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsungnya dalam suatu pola kehidupan insane tertentu yang memiliki sifat dan sarannya manusia itu sendiri. Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk social. sebagai makhluk social manusia tidak dapat terlepas individu yang lain. Secara kodrat manusia akan hidup bersama-sama dengan manusia lain dan saling membutuhkan.

Pada pendidikan standar Nasional ini, ada arah perubahan hasil pendidikan di negeri ini, seperti dijelaskan Dinas Pendidikan Nasional (2008: 7) bahwa, pendidikan Standar Nasional yang bermutu (berkualitas) adalah pendidikan yang mampu mencapai standar mutu nasional dan internasional dan pendidikan internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses dan input sekolah

baik secara nasional maupun internasional.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003 pasal 45 diatas dijelaskan dengan peraturan daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang suatu sistem yaitu Sarana Prasarana. Permasalahan yang menyangkut fasilitas pendidikan ini, erat kaitannya dengan kondisi tanah, bangunan dan perabot yang menjadi penunjang terlaksananya proses pendidikan. Dalam aspek tanah pendidikan, berkaitan dengan status hukum kepemilikan tanah yang menjadi tempat pendidikan, letaknya yang kurang memenuhi persyaratan lancarnya proses pendidikan (sempit, ramai, terpencil, kumuh, labil, dan lain-lain). Aspek bangunan berkenaan dengan kondisi gedung sekolah yang kurang memadai untuk lancarnya proses pendidikan (lembab, gelap, sempit, rapuh, bahkan banyak yang sudah ambruk, dan lain-lain) sampai membahayakan

keselamatan. Aspek perabot berkenaan dengan sarana yang kurang memadai bagi pelaksanaan proses pendidikan (meja-kursi yang reyot, alat peraga yang kurang lengkap, buku paket yang tidak cukup, sarana kesehatan kurang memadai, dan lain-lain), termasuk fasilitas untuk kebutuhan ekstrakurikuler.

Kota Semarang standar Nasional dapat dilihat dengan adanya nilai rata-rata dari setiap SMP di Kota Semarang, yang memiliki fasilitas terbaik, kurang baik maupun tidak baik. Bisa dilihat dari setiap sekolah khususnya SMP. Di Kota Semarang SMP memiliki ruang kelas sebanyak 2.117 ruang, 1.943 dalam kondisi baik, 152 ruang dalam kondisi rusak ringan, 22 ruang dalam kondisi rusak berat dan 12 ruang kelas statusnya bukan milik. (Tahun 2014/2015).

Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sedemikian besar perhatian pemerintah terhadap sarana prasarana pendidikan yang telah

dilakukan setiap tahun ajaran, kesemuanya ini perlu diimbangkan pula dengan pengawasan yang lebih intensif agar tujuan pendidikan dapat dicapai serta seberapa jauh sarana tersebut dimanfaatkan dalam mencapai tujuan sekolah.

B. Perumusan Masalah

- 1 Kriteria apakah yang pantas untuk model dalam sarana prasarana di jenjang SMP Kota Semarang sesuai undang-undang No 20 Tahun 2003?
- 2 Berapa Capaian dalam Pendidikan Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional dalam aspek sarana prasarana di jenjang SMP Kota Semarang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kriteria apakah yang pantas untuk model dalam sarana prasarana di jenjang SMP Kota Semarang sesuai undang-undang No 20 Tahun 2003

2. Untuk mengetahui Capaian dalam Pendidikan Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional dalam aspek sarana prasarana di jenjang SMP Kota Semarang

D. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Dalam mengatur segala kebutuhan masyarakat dalam suatu negara maka dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan publik inilah yang nantinya akan mengikat masyarakat sebagai warga negara untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas, hak, dan kewajibannya agar dapat terkelola dengan baik. Beberapa pakar telah mengemukakan definisi mengenai kebijakan publik seperti William N. Dunn. Definisi mengenai kebijakan publik yang diberikan William N. Dunn yaitu :

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas

pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Pasolong, 2007:39)

Definisi yang dikemukakan William N. Dunn menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil pilihan lembaga atau pejabat negara yang dibuat untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam mengelola negara. Kebijakan dikeluarkan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan. Berbeda dengan William N. Dunn, pakar lain telah mengemukakan definisi mengenai kebijakan publik. Pakar tersebut adalah Thomas R. Dye. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Pasolong, 2007:39) adalah, "Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan".

2. Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah sebuah seni di dalam memahami sebuah rencana kebijakan public yang akan

diterapkan oleh sebuah otoritas publik. Analisis kebijakan publik memerlukan sebuah uraian tentang data, informasi, dan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk menentukan sebuah keputusan, tetapi lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang harus dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif dan kemungkinan rencana kebijakan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan yang memiliki legitimasi atau kewenangan (Badjuri dan Yuwono 2003 : 65)

Sedangkan menurut William Dunn (2000 : 29), analisis kebijakan publik adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan yang

relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan publik dapat dilakukan pada permasalahan publik yang ada kebijakannya ataupun masalah publik yang belum ada kebijakannya

3. Model Menurut David C Korten

Menurut Three Way Fit Theory dari David Korten (1980) menyebutkan bahwa organisasi dalam suatu kelembagaan harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan pelbagai sumber dan memobilisasikannya untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga output program tadi akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti skema berikut: (Tjokrowinoto,

2007:136-138).

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur analisis program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan

desain penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi Kota SemarangSemarang. Informan dalam penelitian ini adalah Sarana Prasarana SMP yang dipilih dengan teknik Prismatic. Sumber data yang digunakan adalah data primer data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder berupa dokumentasi yang dimiliki oleh Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mudah untuk dipahami.Selanjutnya, menguji kualitas data dengan teknik induksidata dengan wawancara mendalam dengan informan atau narasumber, uji silang antarainformasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan, konfirmasi hasil yang diperoleh

kepada informan lain atau sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kriteria Standar Sarana Prasarana Pendidikan Kota Semarang

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya pada peraturan pemerintah Nomer 20 Tahun 2003 “Tentang Standar Nasional Pendidikan”, mulai sekarang sekolah pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan termaksud SMP harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan tersebut, salah satunya upaya untuk mencapai standar nasional pendidikan disetiap sekolah Standar sarana prasarana adalah syarat dari peraturan pemerintah Sebuah SMP sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- 1) ruang kelas,
- 2) ruang perpustakaan,
- 3) ruang laboratorium IPA,

- 4) ruang pimpinan,
- 5) ruang guru,
- 6) ruang tata usaha,
- 7) tempat beribadah,
- 8) ruang konseling,
- 9) ruang UKS,
- 10) ruangorganisasikesiswaan,
- 11) jamban,
- 12) gudang,
- 13) ruang sirkulasi,
- 14) tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.

Syarat ketiga diatas maka perabot dan perlengkapan yang dibuat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat perabot sekolah

1. Ukuran fisik pemakai/murid agar pemakaiannya fungsional dan efektif.

2. Bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan aktivitas murid dalam PBM
- b. Kuat, mudah memeliharanya, dan mudah dibersihkan
- c. Mempunyai pola dasar yang sederhana
- d. Mudah dan ringan untuk disusun/disimpan
- e. Flexible sehingga mudah digunakan dan dapat pula berdiri sendiri

2. Konstruksi hendaknya:

- a) Kuat dan tahan lama
- b) Mudah dikerjakan secara masal
- c) Tidak tergantung keamanan pemakainya

- d) Bahan yang mudah didapat dipasaran dan disesuaikan dengan keadaan setempat.

3. Syarat-syarat untuk perlengkapan sekolah

Agar perlengkapan yang digunakan itu benar-benar tepat guna, maka baik jenis, bentuk, serta warna hendaknya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kegiatan anak didik/siswa. Ini berarti adanya keharusan untuk memilih dan memiliki alat-alat yang sesuai dan disesuaikan dengan umur, minat, serta taraf perkembangan fisik maupun psikhis anak didik. Untuk itu diperlukan:

- a) Keadaan baku/material harus kuat, tetapi ringan, tidak membahayakan keselamatan anak didik.

- b) Konstruksi harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kondisi peserta didik.

c) Dipilih dan direncanakan dengan teliti dan baik serta benar-benar disesuaikan usia, minat, tarap perkembangan anak didik

d) Pengadaan pengaturan harus sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi bagi penanaman, pemupukan, serta pembinaan hal-hal yang berguna bagi perkembangan anak.

B. Capaian Standar Sarana prasarana Pendidikan SMP Kota Semarang Tahun 2014/2015.

Capaian Standar Sarana Prasarana pendidikan yaitu perpustakaan di kota semarang pada kenyataannya juga sangat bervariasi dari baik 81,90%, tidak baik 18,10% dari 18,10% sekolah belum memiliki perpustakaan, Untuk ruang UKS pada kenyataannya juga sangat bervariasi dari 81,86 dalam kondisi baik, untuk kondisi tidak baik 18,14% di jejang smp masih belum mempunyai UKS, Presentase

ruang komputer di kota semarang pada kenyataannya juga masih kurang belum memenuhi standar dari yang 95,43% - 4,57% dari 4,57% masih kekurangan komputer, prosentase ruang laboratorium pada kenyataannya juga bervariasi. Dari lap 80,90% dalam kondisi baik – 19,10% kondisi yang tidak baik (tidak mempunyai laboratorium). Dari indikator tersebut untuk di kota semarang masih kekurangan, standar sarana prasarana dari peraturan pemerintah untuk memenuhi standar nasional 14 jenis sedangkan di kota semarang dari 14 jenis hanya 5 jenis saja. Indikator ini dikaitkan dengan jenis program dan sekolah, yang menyangkut input seperti yang dilihat dari indikator tersebut, proses menyangkut aspek belajar dan mengajar seperti sarana prasarana yang kurang baik atau ketidaknyamanan dari seorang siswa siswi. Indikator tersebut dijadikan pertimbangan aspek

program dilihat dari kondisi di setiap sekolah, kebijakan yang telah dilaksanakan atau perencanaan dengan pengembangan rencana karna pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa indikator yang dilihat dari kondisi sekolah harus memenuhi aspek akuntabilitas agar indikator bisa dilihat atau dipahami dengan jelas.

PENUTUP

Simpulan

Program yang sudah dijalankan dengan keberhasilan untuk memenuhi standar sarana prasarana jika sarana prasarana di Kota Semarang sudah minimal, maka standar nasional pendidikan sudah berhasil. Tetapi disini sarana prasarana pendidikan sudah maksimal dengan prestasi yang dapat dari sekolah tersebut tetapi dalam prasarana masih ada sekolah yang kekurangan dari prasarannya yang kurang baik, terutama dari ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium

yang masih kurang dari fasilitasnya dan ruang multimedia di SMP Kota Semarang masih beberapa kekurangan ruang multimedia, maka standar sarana prasarana di Kota Semarang sudah berhasil tetapi Prasarannya masih belum maksimal.

Berbagai indikator standar sarana prasarana pendidikan khususnya di SMP seluruh Kota Semarang bahwa dari 14 syarat yang harus tercapai untuk memenuhi standar sarana prasarana pendidikan sudah berhasil 100% walau ada beberapa yang tidak 100% seperti kekurangan Ruang Kelas hanya 88%, Ruang laboratorium 84% masih beberapa sekolah yang masih kekurangan, ruang pemimpin 67% ada beberapa sekolah yang tidak mempunyai ruang pemimpin dan ruang pemimpin dijadikan satu dengan ruang guru, Ruang konseling 67%, Ruang organisasi 67% dan jamban 83% itu yang masih kekurangan ruangan. Dari

sarana maupun prasarananya sudah standar hanya beberapa saja yang harus diperbaiki untuk sekolah.

Rekomendasi

Sarana Prasarana di Kota Semarang di masa mendatang yaitu :

1 pengadaan sarana prasarana pengadaan perlengkapan sarana prasarana dalam dinas pendidikan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan disuatu sekolah, seperti mengganti barang yang rusak, hilang, atau pengadaan barang baru yang dipertanggung jawabkan sehingga dapat menjaga ketersediaan barang setiap tahun dan anggaran mendatang. Perencanaan dan estimasi pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang atau kelengkapan sekolah harus direncanakan dengan matang.

2. perencanaan dan pengadaan barang sarana prasarana
Kebutuhan akan sarana

prasarana sekolah haruslah direncanakan. Kebutuhan pengadaan sarana prasarana untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus diperhitungkan dengan matang. Dengan itu kebutuhan aspek pendidikan di satu pihak dan kemampuan di pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

H.M.Daryanto.(2010).*Administrasi Pendidikan*,Jakarta:Rineka Cipta.

Pasolong,Harbani.2007.*Teori Administrasi Publik*.Bandung:Alfabeta

Subarsono,AG.2005. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: pustaka pelajar

Riggs, Fred W, 1978. *Administrasi Negara-Negara Berkembang : The Theory of Prismatic Society*, Houghton Mifflin Company, Boston.

William N. Dunn,2000. *Analisis kebijakan publik*.Yogyakarta:University

Gadjah Mada.

Dr.Riant Nugroho ,2014.public
policy.elex media koputino.

Iskandar, (2010), *Metodologi
Penelitian Pendidikan dan
Sosial (Kuantitatif dan
Kualitatif)*,Jakarta, Gaung
Persada Pers

Moleong. Lexy J. 2005.
*Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Prof.Dr.MoeljartoTjokrowinoto
, MPA,2007. *Pembangunan
DilemadanTantangan*.Yogyaka
rta: Pustaka Pelajar

Sayidiman Suryohadiprojo.
2002. “*Pendidikan Dasar yang
Bermutu*”, Pendidikan untuk
Masyarakat Indonesia Baru.
Jakarta: Grasindo.

Dinas Pendidikan Kota
Semarang tahun 2014/2015